

**PEMETAAN FAKTOR-FAKTOR PENDORONG MASYARAKAT
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENOLAK POLITIK UANG
DALAM PEMILIHAN UMUM**

Adlin, Ali Yusri

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Abstrak

Pemilihan umum legislatif tahun 2014 dianggap oleh berbagai kalangan sebagai pemilihan umum yang paling brutal dalam sejarah bangsa Indonesia sebab praktik politik uang terjadi dengan sangat massif. Praktik politik uang ini dilakukan oleh calon legislatif atau tim suksesnya dengan maksud memaksimalkan perolehan suara hampir dipastikan terjadi di setiap tingkatan dan daerah pemilihan baik untuk legislatif tingkat nasional, legislatif tingkat propinsi dan legislatif tingkat kabupaten atau kota. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan penelitian diketahui bahwa praktik politik uang juga dilakukan oleh calon legislatif tertentu di kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah uang yang dibagikan kemasyarakat sangat bervariasi, namun secara umum uang yang diberikan lebih besar dari 100 ribu rupiah.

Dalam beberapa kedepan yaitu di bulan desember tahun 2015 yang akan datang masyarakat kabupaten kepulauan Meranti juga akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, yang bisa jadi didalamnya kan terjadi praktek politik uang. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menemukan faktor yang mendorong masyarakat menolak politik uang, sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dalam suasana yang jujur dan adil.

*Kata-kata kunci: **Pemilih Sadar, Politik Uang ditolak***

PENDAHULUAN

Penggunaan Politik uang dalam pemilihan umum (pemilu) secara tegas dilarang dalam peraturan perundangan mengenai pemilu yang berlaku di indonesia. Hal tersebut diantaranya termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 32 ayat 1 poin j yang berbunyi :

“pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”¹.

Aturan tersebut menjelaskan bahwa larangan tidak hanya pada memberikan uang atau materi lainnya bahkan menjanjikan uang atau materi lainnya pun dilarang dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Namun faktanya, praktik politik uang sudah merupakan hal yang umum terjadi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Survey komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan pada tahun 2013 menemukan bahwa 78,20% responden mengetahui apa itu yang dimaksud dengan politik uang dan 71,72% responden sepakat bahwa praktik politik uang dalam pemilu merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam pemilu di Indonesia². Bahkan menurut hasil survei lembaga Indonesian Network Election Survey (INES) tahun 2012 ditemukan sebanyak 74,1% responden mengenal partai politik disebabkan adanya pembagian uang pada saat kampanye maupun saat menjelang hari pencoblosan³.

Sikap masyarakat Indonesia pada dasarnya terbelah mengenai politik uang. Survey Lembaga Indikator Politik Indonesia pada bulan maret tahun 2013 menemukan bahwa sebanyak 54,3% masyarakat menolak politik uang, sedangkan 41,5% menerima politik uang dan memilih calon yang memberikan uang kepada mereka⁴. Pada survey bulan september tahun 2013 oleh lembaga yang sama ditemukan bahwa sebanyak 57,9% responden menyatakan bahwa politik uang tidak bisa dibenarkan, sedangkan 41,5% menyatakan bahwa politik uang adalah suatu hal yang wajar dan sisanya tidak menjawab⁵. Bahkan menurut hasil survey Komisi Pemberantasan Korupsi ditemukan bahwa sebanyak 71,72% masyarakat menganggap

¹ Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 32 ayat 1 poin j.

² Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, *laporan hasil penelitian survei persepsi masyarakat terhadap integritas Pemilu* (Jakarta, tahun 2013).

³ INES . “Partai Politik dikenal karena politik uang dan perilaku korup”. (www.tribun.com), akses 22 Juni tahun 2014.

⁴ Indikator Politik Indonesia, *Sikap dan Perilaku Pemilih terhadap Politik Uang* (Jakarta, Maret tahun 2013).

⁵ Ibid.,

suatu hal yang lumrah⁶. Sejalan dengan itu Lembaga Survey Nasional (LSN) juga menyatakan bahwa Pemilu Legislatif tahun 2014 rawan politik uang, sebab alam survey mereka pada bulan maret tahun 2014 didapatkan sebanyak 69,1% masyarakat menyatakan bersedia menerima politik uang meskipun dengan alasan yang berbeda-beda⁷.

Praktik Politik uang juga terjadi di Riau Pada Pemilu Legislatif tahun 2014, termasuk di kabupaten Kuantan Singingi. Data Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa ada laporan 313 kasus politik uang di 16 provinsi di Indonesia, Provinsi Riau nomor dua terbanyak kasus laporan politik uang dengan 33 kasus⁸. Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau menunjukkan bahwa telah terjadi kasus politik uang di Kuantan Singingi, bahkan ada pelakunya yang tertangkap tangan melakukan politik uang senilai Rp. 250.000,- saat menjelang hari pemilihan yang biasa dikenal dengan istilah serangan fajar⁹.

Praktik politik uang juga terjadi pada pemilu Legislatif tahun 2014 di kabupaten Kepulauan Meranti. Besaran jumlah uang yang diberikan calon atau tim suksesnya bervariasi tergantung kemampuan keuangan calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh penulis dari salah seorang informan yang bekerja pada sebuah lembaga pendidikan di wilayah dimaksud pada bulan Oktober 2014 sebagai berikut :

“ informasi yang saya dapatkan memang praktik money politik betul telah terjadi di pada Pileg kemarin, uang yang diberikan bervariasi ada yang memberi Rp. 100.000, Rp. 200.000 bahkan ada yang memberikan uang Rp. 500.000,-”¹⁰.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa memang telah terjadi praktik politik yang dilakukan salah seorang calon Legislatif yang domisili di kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah yang bervariasi. Senada dengan itu salah seorang warga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil mengemukakan hal sebagai berikut :

“ praktik politik uang memang terjadi di Meranti, ada Caleg dari partai politik tertentu yang membagikan uang sebesar Rp.500.000,- bahkan ada yang lebih

⁶ Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi,. Op.Cit.

⁷ Pemilu 2014 Lebih Rawan Politik Uang” (<http://pemilu.tempo.co>), akses 22 Juni 2014.

⁸ Lihat berita 313 kasus politik uang ditemukan dalam Pileg 2014, (www.antikorupsi.org), akses 22 juni 2014.

⁹ Bawaslu Riau : Laporan Paling Banyak Soal Politik Uang, (www.Beritasatu.com), akses 22 juni 2014.

¹⁰ Wawancara dengan salah seorang warga Selat Panjang yang bekerja dibidang pendidikan , bulan November tahun 2014.

besar dari itu perkepala dengan ajakan memilih Caleg tertentu untuk tingkat DPRD Kabupaten. Bahkan ada Caleg yang bunuh diri akibat uangnya habis, namun tidak duduk sebagai anggota DPRD”¹¹.

Hasil wawancara tersebut kembali menjelaskan bahwa memang telah terjadi praktik politik uang di kabupaten Kepulauan Meranti dan terlihat para caleg sangat royal dan bahkan habis-habisan memberikan uangnya kepada Pemilih.

Masalah politik uang yang demikian parah perlu diantisipasi dengan cara mencari faktor-faktor kunci yang mendorong masyarakat menolak politik uang dalam Pemilihan Umum. Pada Bulan Desember tahun 2015 ini, masyarakat di kabupaten Kepulauan Meranti akan mengikuti pemilihan umum kepala daerah secara langsung yang bisa jadi akan sarat dengan politik uang. Hal yang demikian tidak boleh dibiarkan, perlu dicarikan solusi guna mengurangi pengaruh politik uang dalam Pemilu. Oleh karena itu penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : ***Faktor-faktor yang mendorong pemilih menolak politik uang dalam Pemilihan Umum?***

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Lucky praktik politik uang (*money politics*) dan jual beli suara (*vote buying*) muncul di berbagai negara baik negara terbelakang, negara sedang berkembang atau negara modern, yang membedakan hanya ukurannya dan praktiknya di berbagai negara¹². Dalam konteks Indonesia, menurut Bumke politik uang mencakup jual beli suara (*vote buying*), broker suara (*vote-broking*), patronase (*patronage*), dan korupsi politic (*political corruption*)¹³.

Praktik Politik uang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik jual beli suara (*vote buying*). Istilah *vote buying* menurut Valeria Busco merupakan pemberian uang atau umumnya barang-barang konsumsi oleh kandidat atau partai politik kepada pemilih sebagai bentuk pertukaran dari suara penerima¹⁴. Bahkan Schedler berpendapat istilah *vote buying* mencakup aktivitas membagikan paket makanan, pembelian kartu pemilih, pemberian keuntungan sosial dan pemberian

¹¹ Wawancara dengan salah seorang warga Selat Panjang yang bekerja sebagai PNS , bulan November tahun 2014.

¹² Owusa O. Lucky. “ Money Politics and Voting Buying di Negeria: The Bane of Governance”. Afro Asian Journal Of Social Sciences. Volume 4, No. 4.3 Quater III (2013), hal. 3

¹³ Ade irawan, et.al., *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. (Jakarta: ICW, 2014). Hal 42.

¹⁴ Ibid., 43.

keuntungan pelayanan publik kepada masyarakat lokal¹⁵. Lebih jauh menurut Ade Irawan et.al dari Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menjelaskan bahwa vote buying merupakan perilaku korupsi yang dilakukan seseorang biasanya berbentuk pemberian atau hadiah terutama dalam bentuk uang, barang berharga atau janji kepada seseorang dengan tujuan mempengaruhi perilaku penerima tersebut¹⁶. Praktik politik uang memang terjadi di Indonesia, dalam sebuah penelitiannya Lili Romli menemukan beberapa narasumber mengungkapkan kecenderungan masyarakat saat sekarang lebih bersifat transaksional ketika berhubungan dengan partai dan calon legislatif, misalnya mereka akan meminta imbalan kepada caleg atau partai tertentu jika caleg atau partai tersebut ingin mendapatkan suaranya dalam pemilu¹⁷.

Penyebab maraknya praktik politik uang berhasil diidentifikasi oleh para peneliti. Hasil penelitian Davis (2006) sebagaimana dikutip oleh Lucky menyimpulkan beberapa penyebab maraknya politik uang dan pembelian suara di Nigeria, yaitu :

1. Partai Politik dan kandidat peserta pemilu tidak mampu menghadirkan program yang jelas dan komprehensif di mata pemilihnya;
2. Berkembangnya rasa sinisme dan ketidakpercayaan pemilih terhadap pemegang jabatan politik dan proses politik;
3. Kandidat terlalu fokus pada pengembangan figur dibandingkan menawarkan isu;
4. Adanya anggapan pemilih bahwa calon yang mencalonkan dalam pemilu akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa jika mereka terpilih, sehingga pemilih menjual suaranya dengan harga mahal;
5. Kegemaran kandidat yang memberikan uang sebagai usaha membujuk pemilih¹⁸.

Sebaliknya para peneliti lainnya juga berhasil menemukan beberapa faktor yang menyebabkan pemilih menolak atau membelot dari praktik politik uang. Penelitian Bratton di Nigeria menyimpulkan beberapa alasan pemilih membelot atau menjatuhkan pilihan yang sesuai dengan anjuran pemberi uang, antara lain:

1. Pemilih merasa orang-orang disekitarnya juga menjatuhkan pilihan tidak sesuai saran yang memberi uang (membelot);
2. Pemilih merasa pilihan adalah suatu hal rahasia;
3. Pemilih mempunyai komitmen pada sistem demokrasi;

¹⁵ Andreas Schedler, “What is vote buying” (seminar Comparative Politics of vote buying di MIT, Cambridge 26-27 September 2002).

¹⁶ Ade Irawan, et.al., Op.Cit. Hal 43.

¹⁷ Lili Romli, “.....” Jurnal Penelitian Politik, Vol 7, No.1 (Januari, 2010). Hal ...

¹⁸ Ovwasa O. Lucky. Op.Cit hal. 11.

4. Pemilih sudah sejahtera, sedangkan pemilih yang masih miskin cenderung patuh pada pemberi uang;
5. Pemilih masih berusia muda, sedangkan pemilih yang sudah tua cenderung patuh pada pemberi uang;
6. Pemilih berjenis kelamin laki-laki, sedangkan pemilih yang berjenis kelamin perempuan cenderung patuh pada pemberi uang;
7. Pemilih yang berdomisili di perkotaan, sedangkan pemilih yang berdomisili di pedesaan cenderung patuh pada pemberi uang¹⁹.

Sejalan dengan itu, alasan pemilih menolak atau tidak menjatuhkan pilihan berdasarkan praktik politik uang juga teridentifikasi dalam survei yang dilakukan oleh lembaga yang berbeda di Indonesia. Survey Lembaga Indikator Politik Indonesia pada bulan September tahun 2013 menyimpulkan beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku menolak politik uang di Indonesia sebagai berikut :

1. Pemilih yang memiliki loyalitas terhadap partai cenderung menolak politik uang;
2. Pemilih di daerah perkotaan cenderung menolak Politik uang di bandingkan daerah pedesaan;
3. Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi kecenderungan menolak politik yang;
4. Semakin tinggi pendapatan semakin tinggi kecenderungan menolak politik uang²⁰.

Kemudian lembaga tersebut juga merinci beberapa faktor yang tidak berhubungan dengan penolakan politik uang, yaitu :

1. Tingkat keikutsertaan pemilih dalam organisasi tidak berhubungan dengan sikap menerima atau menolak politik uang;
2. Gender Pemilih tidak berhubungan dengan sikap menerima atau menolak politik uang;
3. Usia Pemilih juga tidak berhubungan dengan sikap menerima atau menolak politik uang²¹.

Penelitian lembaga Polling Center yang melakukan penelitian di Propinsi Kalimantan Timur juga berhasil mengidentifikasi beberapa alasan pemilih yang menolak politik uang, antara lain :

¹⁹ Michael Bratton, “Vote Buying and violence in Negerian Election Champaign : A Comvarative series of national public attitudes survey on democracy, market and Civil Society In Afrika”, (Afro Barometers working Paper No.99)., Hal 12-14

²⁰ Indikator Politik Indonesia. Op.Cit.

²¹ Ibid.,

1. Pemilih menganggap bahwa praktik politik uang merupakan kegiatan yang tidak positif (curang, penyebab terjadinya korupsi, membuat pemilih tidak bisa minta pertanggung jawaban calon terpilih, melanggar hukum positif, bahkan berdosa menurut agama);
2. Pemilih menganggap politik uang tidak menguntungkan mereka (tidak mau mencari masalah, tidak mau berhutang budi kepada calon, malas antri berdesak-desakan, dan bentuk dan jumlah pemberian tidak sesuai dengan yang mereka harapkan);
3. Pemilih merasa politik uang tidak diberikan oleh calon yang diunggulkan atau calon yang mereka tidak sukai²².

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pemilih di desa Tanjung Pauh tidak memilih calon legislatif yang mempraktekkan politik uang, antara lain:

1. Pemilih merasa bahwa banyak orang lain yang dikenalnya juga akan memilih calon legislatif yang tidak mempraktekkan politik uang;
2. Pemilih merasa pilihannya adalah rahasia yang tidak perlu diketahui orang lain;
3. Pemilih mempunyai komitmen pada demokrasi;
4. Pemilih sangat loyal pada partainya serta kandidat yang diusung oleh partainya;
5. Pemilih memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi;
6. Pemilih memiliki pendapatan yang memadai;
7. Pemilih masih berusia muda atau relatif bebas menentukan pilihan;
8. Pemilih sebagian besar laki-laki atau memiliki keberanian melakukan sesuatu yang dianggapnya benar;
9. Pemilih menganggap bahwa politik uang merupakan tindakan yang tidak positif atau tidak pantas dilakukan sebab bertentangan dengan hati nurani, moral, agama, hukum dan menjadi penyebab maraknya perilaku korupsi;
10. Pemilih menganggap bahwa politik uang tidak menguntungkan mereka sebab jumlah bentuknya tidak sesuai harapan, menimbulkan masalah bagi mereka;
11. Pemilih merasa kandidat yang menjalankan praktik uang itu adalah calon yang mereka tidak sukai atau peluang menangnya tipis.

Berdasarkan Tinjauan Pustaka tersebut, maka penulis menguji beberapa faktor yang kiranya dapat mendorong masyarakat Menolak Politik uang yaitu:

²² Polling Center , *Survei Dasar Terhadap Pemahaman, Persepsi Dan Praktik Pemilih Terkait Aspek Pemilu Di Enam Target Propinsi*.(....., 25 November 2013). hal 72-73.

1. Pemilih merasa calon tidak sesuai selera diartikan sebagai adanya penilaian pemilih bahwa calon yang memberikan uang adalah calon mereka tidak sukai.
2. Pemilih melihat ada calon lain yang lebih berkualitas diartikan sebagai adanya penilaian pemilih bahwa ada calon lain yang mereka nilai lebih berkualitas dan lebih pantas dipilih dibanding calon yang memberikan uang;
3. Memiliki masalah dengan calon atau keluarga calon diartikan sebagai kondisi yang dialami pemilih yang kurang membahagiakan ketika berinteraksi dengan calon atau keluarga calon yang memberikan uang;
4. Berhutang budi pada calon lain diartikan sebagai adanya perasaan pemilih yang lebih memilih calon yang berbuat baik kepadanya dibandingkan calon yang memberikan uang;
5. Pemilih merasa diawasi secara ketat diartikan pemilih merasa diawasi dengan ketat oleh berbagai pihak baik tim sukses lawan maupun pihak penyelenggara pemilu;
6. Pemilih merasa sudah sejahtera diartikan sebagai perasaan pemilih yang sudah kaya sehingga tidak mau pilihan politiknya dipengaruhi uang;
7. Menyadari bahwa politik uang bertentangan dengan agama dan moral diartikan adanya kesadaran pemilih bahwa praktik uang merupakan curang atau tidak positif yang bertentangan dengan nilai moral dan agama.
8. Menyadari bahwa menerima politik uang akan mengalami masalah hukum diartikan adanya kesadaran pemilih bahwa menerima politik uang dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai aturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan responden menggunakan teknik *multistage random sampling*. Dilakukan di 9 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, jumlah responden di setiap kecamatan bervariasi karena mempertimbangkan proporsi pemilih di setiap kecamatan. Di setiap kecamatan diambil beberapa kelurahan atau desa dan setiap kelurahan di ambil 5 Tempat pemungutan Suara (TPS) dan di setiap TPS diambil 2 responden secara acak, sehingga total responden penelitian ini adalah 800 orang responden. Pengambilan data dilakukan dengan menyajikan kuesioner yang berisi pertanyaan tertutup kepada

responden terpilih. Kemudian data yang terkumpul akan dianalisa melalui dengan menampilkan frekuensi data temuan penelitian dalam bentuk tabulasi tunggal.

TEMUAN PENELITIAN

1. Respon Masyarakat Terhadap Aksi Pemberian Uang Oleh Calon atau Tim Sukses Calon

Untuk mengetahui respon masyarakat Meranti tentang aksi Politik uang, maka dalam penelitian diajukan pertanyaan tentang bagaimana perasaan responden jika diberi uang oleh Calon ataupun tim sukses Calon. Gambaran respon masyarakat tersebut dapat dilihat pada pada Tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1. Perasaan Responden Ketika Menerima Uang dari Calon Atau Pun Tim Sukses Calon

Pertanyaan	Jawaban				Total (Jumlah/%)
	Sangat Senang (Jumlah/%)	Senang (Jumlah/%)	Tidak Senang (Jumlah/%)	Tidak Jawab (Jumlah/%)	
Bagaimana Perasaan Bapak/ Ibu Jika Mendapat Uang dari Calon Atau Tim Sukses Calon	8 (10,5)	335 (41,9)	196 (24,5)	185 (23,1)	800 (100)

Sumber : Data Olahan.

Data dalam tabel 5.1, Menunjukkan bahwa sebagian besar responden (41,9%) masyarakat menyatakan merasa senang jika mendapatkan uang dari calon atau tim sukses calon, bahkan sebanyak 10,5 % merasa sangat senang jika mendapatkan uang dari calon ataupun tim sukses calon. Jika digabungkan jumlah responden yang menjawab senang dan sangat senang menerima uang dari calon atau tim suksesnya maka totalnya adalah 52,3 %. Ini artinya mayoritas masyarakat senang akan adanya politik uang, jika uang tersebut sampai ke tangan mereka. Temuan ini membuktikan bahwa mayoritas masyarakat memang senang dengan politik uang, hal ini tentunya akan menyulitkan tercapainya pemilu yang bersih tanpa politik uang di kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Analisis Faktor- Faktor Yang Mendorong Masyarakat Menolak Politik Uang

Fenomena masyarakat yang senang dengan adanya politik uang diyakini bisa secara bertahap dikurangi oleh karena itu perlu diketahui faktor apa saja yang dapat membuat masyarakat menolak menerima uang dari tim sukses dan calonnya. Faktor yang diteliti tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Pemilih Menilai Bahwa Calon Yang Memberikan Uang Tidak Sesuai dengan Selera Pemilih

Pemilihan pemilih terhadap calon biasanya berdasarkan tingkat kesukaan pemilih terhadap calon (elektabilitas calon). Oleh karena itu perlu diuji apakah calon yang memberikan uang, namun kurang disukai, menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat menolak politik uang. Gambaran jawaban responden dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini :

**Tabel 5.2 Gambaran Jawaban Responden Tentang Menolak Politik Uang
 Disebabkan Calon Yang Memberi Tidak Sesuai Selera**

Pertanyaan	Jawaban		Tidak Jawab (Jumlah/%)	Total (Jumlah/%)
	Ya (Jumlah/%)	Tidak (Jumlah/%)		
Apakah Bapak/ Ibu akan menolak pemberian Uang dari calon disebabkan Calon tersebut tidak sesuai dengan selera Bapak/ ibu?	499 (62,4)	252 (31,5)	49 (6,1)	800 (100)

Sumber : Data Olahan.

Data dalam tabel 5.2, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (62,4%) masyarakat menyatakan akan menolak politik uang atau politik uang tidak akan mempengaruhi pilihan mereka jika calon yang memberikan uang tidak sesuai dengan selera mereka. Ini artinya tingkat kesukaan pemilih terhadap calon merupakan hal yang utama, sedangkan pemberian uang merupakan faktor menguatkan pilihan masyarakat pada calon tertentu. Maksudnya calon yang memberi uang juga harus disukai oleh pemilih sedangkan uang yang diberikannya kepada masyarakat menjadi faktor yang menguatkan masyarakat untuk memilih calon tersebut. Disisi lain dapat

dilihat politik uang tidak akan berpengaruh (ditolak) oleh masyarakat jika calonnya memang tidak disukai atau tidak sesuai dengan selera masyarakat.

b. **Pemilih Menilai Bahwa Ada Calon Lain Yang Lebih Berkualitas dibandingkan Calon Yang Memberi Uang**

Faktor lainnya yang diuji adalah apakah pemilih akan menolak politik uang jika pemilih melihat ada alternatif pilihan yang lebih baik dalam hal ini ada calon lain yang lebih berkualitas di mata Pemilih. Gambaran jawaban responden dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

**Tabel 5.3 Gambaran Jawaban Responden Tentang Menolak Politik Uang
 Disebabkan Ada Calon Alternatif Yang Lebih Berkualitas**

Pertanyaan	Jawaban		Tidak Jawab (Jumlah/%)	Total (Jumlah/%)
	Ya (Jumlah/%)	Tidak (Jumlah/%)		
Apakah Bapak/ Ibu akan menolak pemberian Uang disebabkan Melihat calon alternatif lain yang lebih berkualitas ?	522 (65,3)	244 (30,5)	34 (4,2)	800 (100)

Sumber : Data Olahan.

Data dalam tabel 5.3, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (65,3%) masyarakat menyatakan akan menolak politik uang atau politik uang tidak akan mempengaruhi pilihan mereka jika mereka melihat ada calon alternatif yang lebih berkualitas dibandingkan calon yang memberikan uang. Temuan ini menunjukkan berjalannya politik uang selama ini disebabkan masyarakat melihat tidak calon alternatif yang lebih berkualitas, ini artinya baik calon yang memberi uang ataupun yang tidak memberi uang kualitasnya tidak jauh berbeda, sehingga masyarakat cenderung memilih calon yang memberi uang. Hal ini juga dapat diartikan bahwa politik uang bisa tidak berpengaruh jika masyarakat melihat ada calon-calon yang berkompetisi memiliki kualitas pribadi yang jauh lebih baik dibandingkan calon-calon yang membagi-bagikan uang.

c. Pemilih Menolak Politik Uang karena Pernah bermasalah dengan Calon atau Keluarga Calon yang Melakukan Politik Uang

Faktor selanjutnya yang diuji adalah apakah pemilih akan menolak politik uang jika pemilih pernah mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari calon atau pun keluarga calon yang melakukan politik uang tersebut. Gambaran jawaban responden dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini :

Tabel 5.4 Gambaran Jawaban Responden Tentang Menolak Politik Uang Disebabkan Pernah Bermasalah Dengan Calon Atau Keluarganya

Pertanyaan	Jawaban		Tidak Jawab (Jumlah/%)	Total (Jumlah/%)
	Ya (Jumlah/%)	Tidak (Jumlah/%)		
Apakah Bapak/ Ibu akan menolak pemberian Uang disebabkan Pernah Bermasalah dengan calon atau keluarganya?	188 (23,5)	573 (71,6)	39 (4,9)	800 (100)

Sumber : Data Olahan.

Data dalam tabel 5.4, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (71,6%) masyarakat menyatakan tidak akan menolak politik uang atau politik uang tetap akan membuat mereka memilih calon pemberi uang, walaupun mereka pernah mendapatkan perlakuan kurang baik dari calon ataupun keluarga calon tersebut. Temuan ini menunjukkan hubungan yang kurang baik antara pemilih dengan calon dapat dicairkan dengan pemberian uang oleh calon, dengan adanya pemberian uang maka hubungan pun berubah dari hubungan yang kurang baik menjadi hubungan baik, sehingga pemilih akan memilih calon yang memberikan uang dibandingkan calon yang tidak memberi uang.

d. Pemilih Menolak Politik Uang disebabkan Pemilih Merasa berhutang Budi pada Calon lain Yang Tidak Memberikan Uang

Faktor selanjutnya yang diuji adalah apakah pemilih akan menolak politik uang jika pemilih merasa berhutang budi pada calon lain yang tidak membagikan

uang, disebabkan ada rasa hutang budi tersebut pemilih tidak akan memilih calon yang memberi uang, namun akan memilih calon yang pernah berbuat baik padanya walaupun calon tersebut tidak memberikan uang. Gambaran jawaban responden dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini :

Tabel 5.5 Gambaran Jawaban Responden Tentang Menolak Politik Uang Disebabkan Berhutang Budi pada Calon Lain

Pertanyaan	Jawaban		Tidak Jawab (Jumlah/%)	Total (Jumlah/%)
	Ya (Jumlah/%)	Tidak (Jumlah/%)		
Apakah Bapak/ Ibu akan menolak pemberian Uang disebabkan merasa berhutang budi pada calon lain yang tidak memberikan uang?	278 (38,4)	493 (61,6)	29 (3,6)	800 (100)

Sumber : Data Olahan.

Data dalam tabel 5.5, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (61,6%) masyarakat menyatakan tidak akan menolak politik uang atau politik uang tetap akan membuat mereka memilih calon pemberi uang, walaupun mereka pernah mendapatkan budi baik dari calon lain yang berkompetisi dalam Pemilu tersebut. Temuan ini menunjukkan budi baik calon yang tidak membagikan uang dapat dikalahkan oleh pemberian uang yang dilakukan oleh calon lainnya.

e. Pemilih Menolak Politik Uang disebabkan Adanya Muncul Kesadaran Bahwa Politik Uang bertentangan Dengan Ajaran Agama dan Moral

Faktor selanjutnya yang diuji adalah apakah pemilih akan menolak politik uang jika pemilih menyadari bahwa politik uang bertentangan dengan ajaran agama dan moral. Gambaran jawaban responden dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut ini :

**Tabel 5.6 Gambaran Jawaban Responden Tentang Menolak Politik Uang
 Disebabkan Pemilih Menyadari Bahwa Politik Uang Ternyata
 Bertentangan dengan Ajaran Agama dan Moral**

Pertanyaan	Jawaban		Tidak Jawab (Jumlah/%)	Total (Jumlah/%)
	Ya (Jumlah/%)	Tidak (Jumlah/%)		
Apakah Bapak/ Ibu akan menolak pemberian Uang disebabkan menyadari bahwa ternyata politik uang bertentangan dengan ajaran agama dan moral?	540 (67,5)	226 (28,3)	34 (4,3)	800 (100)

Sumber : Data Olahan.

Data dalam tabel 5.6, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (67,5%) masyarakat menyatakan akan menolak politik uang jika mereka menyadari bahwa politik uang bertentangan dengan ajaran agama dan tidak baik menurut standar moral. Temuan ini menunjukkan bahwa politik uang terus terjadi disebabkan pemilih tidak sadar bahwa politik uang bertentangan dengan agama dan nilai-nilai moral yang baik. Ini artinya bahwa pengaruh politik uang dapat dikurangi jika kesadaran pemilih ditingkatkan bahwa politik uang ini bertentangan dengan ajaran agama dan moral, sehingga perilaku menerima politik uang akan mendapat hukuman dari Tuhan dan Sanksi sosial dari masyarakat.

- f. Pemilih Menolak Politik Uang disebabkan Merasa di Awasi oleh Berbagai Pihak secara Ketat

Faktor selanjutnya yang diuji adalah apakah pemilih akan menolak politik uang jika pemilih merasa takut dengan banyak sekali mata-mata atau pihak mengawasi politik uang, mulai dari tim sukses lawan sampai pada pihak pengawas Pemilihan Umum. Gambaran jawaban responden dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut ini :

uang, disebabkan ada rasa hutang budi tersebut pemilih tidak akan memilih calon yang memberi uang, namun akan memilih calon yang pernah berbuat baik padanya walaupun calon tersebut tidak memberikan uang. Gambaran jawaban responden dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini :

**Tabel 5.5 Gambaran Jawaban Responden Tentang Menolak Politik Uang
 Disebabkan Berhutang Budi pada Calon Lain**

Pertanyaan	Jawaban		Tidak Jawab (Jumlah/%)	Total (Jumlah/%)
	Ya (Jumlah/%)	Tidak (Jumlah/%)		
Apakah Bapak/ Ibu akan menolak pemberian Uang disebabkan merasa berhutang budi pada calon lain yang tidak memberikan uang?	278 (38,4)	493 (61,6)	29 (3,6)	800 (100)

Sumber : Data Olahan.

Data dalam tabel 5.5, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (61,6%) masyarakat menyatakan tidak akan menolak politik uang atau politik uang tetap akan membuat mereka memilih calon pemberi uang, walaupun mereka pernah mendapatkan budi baik dari calon lain yang berkompetisi dalam Pemilu tersebut. Temuan ini menunjukkan budi baik calon yang tidak membagikan uang dapat dikalahkan oleh pemberian uang yang dilakukan oleh calon lainnya.

e. Pemilih Menolak Politik Uang disebabkan Adanya Muncul Kesadaran Bahwa Politik Uang bertentangan Dengan Ajaran Agama dan Moral

Faktor selanjutnya yang diuji adalah apakah pemilih akan menolak politik uang jika pemilih menyadari bahwa politik uang bertentangan dengan ajaran agama dan moral. Gambaran jawaban responden dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut ini :

**Tabel 5.8 Gambaran Jawaban Responden Tentang Menolak Politik Uang
Disebabkan Pemilih Merasa Sudah Sejahtera Sehingga Uang
Tidak Mempengaruhi Pilihan Politik**

Pertanyaan	Jawaban			Total (Jumlah/%)
	Ya (Jumlah/%)	Tidak (Jumlah/%)	Tidak Jawab (Jumlah/%)	
Apakah Bapak/ Ibu akan menolak pemberian Uang jika Bapak/ Ibu sudah merasa sudah sejahtera?	183 (22,9)	583 (72,9)	34 (4,2)	800 (100)

Sumber : Data Olahan.

Data dalam tabel 5.8, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (72,9%) masyarakat menyatakan tidak akan menolak politik uang meskipun mereka merasa sudah sejahtera. Temuan ini menunjukkan bahwa walaupun sudah dalam keadaan sejahtera sebagian besar masyarakat tetap akan menerima politik uang. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa pada dasarnya masyarakat memang senang dengan politik uang. Ini artinya masyarakat yang melibatkan diri menerima politik uang tidak hanya dari kalangan menengah ke bawah, namun kalangan menengah ke atas juga ingin menerima politik uang yang sengaja disebarkan calon menjelang pemilihan Umum.

h. Pemilih Menolak Politik Uang disebabkan Jika Pemilih Menyadari Bahwa Menerima Politik Uang dapat dikenai hukuman Penjara

Faktor selanjutnya yang diuji adalah apakah pemilih akan menolak politik uang jika pemilih menyadari bahwa menerima politik uang dapat dikenai hukuman penjara. Gambaran jawaban responden dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut ini :

**Tabel 5.9 Gambaran Jawaban Responden Tentang Menolak Politik Uang
Disebabkan Jika Pemilih Menyadari bahwa Menerima Politik
Uang Dapat dikenai Hukuman Penjara**

Pertanyaan	Jawaban		Tidak Jawab (Jumlah/%)	Total (Jumlah/%)
	Ya (Jumlah/%)	Tidak (Jumlah/%)		
Apakah Bapak/ Ibu akan menolak pemberian Uang jika Bapak/ Ibu sudah merasa menerima politik uang dapat dikenai hukuman penjara?	523 (65,4)	246 (30,8)	31 (4,0)	800 (100)

Sumber : Data Olahan.

Data dalam tabel 5.9, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (65,4%) masyarakat menyatakan akan menolak politik uang jika mengetahui bahwa menerima politik uang dapat dikenai hukuman Penjara. Temuan ini menunjukkan bahwa politik uang terjadi selama ini disebabkan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahwa menerima politik uang dapat berikat pada dikenainya pemilih dengan hukuman penjara. Disisi lain artinya upaya-upaya penyadaran kepada masyarakat tentang pelaku politik uang baik yang memberi dan yang menerima dapat dihukum penjara perlu ditingkatkan guna mewujudkan kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang.

SIMPULAN

Temuan Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat senang dan sangat senang menerima politik uang yang dibirikan calon ataupun tim suksesnya. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong mayoritas responden penelitian menolak politik uang yaitu : sebanyak 67,5% responden akan menolak politik uang apabila mereka menyadari bahwa menerima politik uang bertentangan dengan ajaran agama atau moral, sebanyak 65,4% responden akan menolak politik uang apabila responden menyadari menerima politik uang dapat dikenai hukuman penjara, sebanyak 65,3% responden akan menolak politik uang apabila mereka jika mereka melihat ada calon lain yang lebih berkualitas, sebanyak 62,4% responden akan menolak politik uang apabila mereka menilai calon yang akan memberikan uang tidak sesuai dengan selera mereka.

Sebaliknya ada beberapa faktor yang tidak mampu mendorong masyarakat untuk menolak politik uang, yaitu : ada merasa hutang budi pada calon lain, kondisi kesejahteraan ekonomi keluarga responden, banyaknya pengawasan dari berbagai pihak dan pernah memiliki masalah dengan calon atau keluarga tidak akan membuat mayoritas masyarakat di Kepulauan Meranti menolak politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Makalah dan Dokumen

- Bratton, Michael, “Vote Buying and violence in Negerian Election Champaign : A Comvarative series of national public attitudes survey on democracy, market and Civil Society In Afrika”, (Afro Barometers working Paper No.99)., Hal 12-14
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, *laporan hasil penelitian survei persepsi masyarakat terhadap integritas Pemilu*. Jakarta, tahun 2013.
- Indikator Politik Indonesia, *Sikap dan Perilaku Pemilih terhadap Politik Uang*. Jakarta, Maret tahun 2013.
- Polling Center , *Survei Dasar Terhadap Pemahaman, Persepsi Dan Praktik Pemilih Terkait Aspek Pemilu Di Enam Target Propinsi.....*, 25 N ovember 2013.
- Irawan, Ade, et.al., *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. Jakarta: ICW, 2014.
- Romli, Lili , “” Jurnal Penelitian Politik, Vol 7, No.1 (Januari, 2010). hal ...
- Lucky, Ovwasa O..” Money Politics and Voting Buying di Negeria: The Bane of Governance”. Afro Asian Journal Of Social Sciences. Volume 4, N o. 4.3 Quater III (2013), hal. 1-19.
- Schedler, Andreas, “ What is vote buying” s eminar Comparative Politics of vote buying di MIT, Cambridge 26-27 September 2002.

A. Artikel Internet

Bawaslu Riau : Laporan Paling Banyak Soal Politik Uang, (www.Beritasatu.com), akses 22 juni 2014.

INES . “ Partai Politik dikenal karena politik uang dan perilaku korup”. (www.tribun.com), akses 22 Juni tahun 2014.

Pemilu 2014 Lebih Rawan Politik Uang” ([http:// pemilu.tempo.co](http://pemilu.tempo.co)), akses 22 Juni 2014.

313 kasus politik uang ditemukan dalam Pileg 2014, (www.antikorupsi.org), akses 22 juni 2014.

B. Peraturan Perundangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.